

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdorong untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit yang dilakukan pemerintah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Armando, 2013).

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada para pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan pemerintah (Zuliarti, 2012). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Arfianti, 2011). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut memiliki nilai. Nilai tersebut diantaranya adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan. Keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid sedangkan ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat

keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi itu kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Suwardjono, 2005).

Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan ditandai lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya pedoman tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*. Perubahan berikutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual. (kementerian keuangan, 2014)

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. (kementerian keuangan, 2014).

Di Indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi sektor publik sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisasian berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor publik, baik satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Organisasi sektor publik merupakan semua institusi negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang dibiayai dari dana publik. SKPD sebagai satuan kerja Pemerintah Daerah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar, khususnya dalam hal menyajikan laporan keuangannya secara akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diberikan, terlebih lagi setelah ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. (kementerian keuangan, 2014).

Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia tidak serta-merta dapat langsung melakukan peralihan dari sistem akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 7

ayat 1 menyebutkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Ketentuan ini juga ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 di lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 1 menguraikan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang mulai akan diterapkan paling lambat 4 (empat) tahun semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ini ditetapkan, dan Lampiran II menguraikan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang diterapkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun 2014. (kementrian keuangan, 2014).

Dalam studi pendahuluan yang penulis lakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Inspektorat Kota Bandar Lampung (Yuli Cahyati, ST. M.Si.,) pada bulan Oktober 2016, diketahui bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2010. Penerapan ini dilakukan dengan melaksanakan pelaporan keuangan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) selama lima tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, lalu berubah menjadi akrual murni sejak tahun 2015. Dalam prakteknya, pelaporan keuangan basis kas menuju akrual di Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan dengan mewajibkan SKPD sebagai entitas pelaporan untuk membuat 2 laporan keuangan. Satu laporan berbasis kas dan satu lagi adalah laporan keuangan berbasis akrual. Kebijakan ini, selain bertujuan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia penyusun Laporan Keuangan, juga untuk mendapatkan nilai ekuitas awal yang tepat pada jurnal awal laporan keuangan berbasis akrual murni di tahun 2015. Sedangkan untuk sistem akuntansi dan sarana pendukung, Kota Bandar Lampung membuat sistem *software* tersendiri berbasis *Excell*, sehingga konsolidasi keuangan dengan tiap SKPD dilakukan secara manual tidak melalui suatu sistem yang terhubung dengan jaringan (*network*).

Penekanan pelaksanaan tahapan ini adalah pada pelatihan pembuatan laporan keuangan yang intensif oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)

selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), yang bertanggungjawab atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, kepada para Kepala Sub bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Pembukuan seluruh SKPD. Alasan lain mengapa pelatihan sangat diperlukan adalah karena baik Kepala Sub bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Pembukuan di masing-masing SKPD, memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan hanya sedikit yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Selain itu, penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jika menggunakan ilustrasi piramida organisasi, tugas akuntansi berada pada level paling bawah yaitu level operasional dan transaksional. Level ini punya ciri khas yaitu teknis, repetitive, prosedural, standar dan membosankan. Contohnya, akuntansi yang menangani transaksi pembelian, penjualan, pengiriman barang, pembayaran transaksi, penerimaan hasil penjualan dan penyusunan laporan. Ciri khas ini yang menjadi alasan utama mengapa teknologi informasi berkaitan erat dengan akuntansi.

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penilaian BPK dilandaskan pada pernyataan profesional pemeriksa (auditor) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (Sarjono, 2012).

Menurut Kepala Sub Bagian Keuangan Inspektorat Kota Bandar Lampung (Yuli Cahyati, ST. M.Si.) pada bulan Oktober 2016 juga diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tanpa catatan, selama lima tahun berturut-turut, yaitu sejak 2010 sampai dengan 2014, lalu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dengan catatan setelah implementasi SAP berbasis akrual murni pada tahun 2015. Hal ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah berhasil dalam menerapkan SAP berbasis akrual dalam pembuatan Laporan Keuangan, meskipun menggunakan sistem teknologi informasi manual tanpa jaringan. Ini berarti, kualitas teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangan secara manual ini memiliki kualitas yang baik dan cukup dapat diandalkan.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu Supra (2016) yang menguji Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Teknologi Informasi Dan Pelatihan Terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh hasil Tingkat Pendidikan, Kualitas Teknologi Informasi Dan Pelatihan berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Penelitian ini, merupakan replikasi dari Supra (2016). Perbedaannya terletak pada tahun penelitian dan objek penelitian. Selain itu, indikator opini WTP dari BPK dalam variabel Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung (Y) juga merupakan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh pelatihan, kualitas teknologi informasi dan pendidikan terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengelola keuangan daerah berbasis akrual, melalui penelitian berjudul : **PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KUALITAS TEKNOLOGI**

## **INFORMASI DAN PELATIHAN TERHADAP KEBERHASILAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh variabel pendidikan, terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pengaruh variabel kualitas teknologi informasi terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung ?
3. Bagaimana pengaruh variabel pelatihan terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung ?

### **1.3.Ruang Lingkup Penelitian**

Objek Penelitian adalah Manajemen Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya penerapan SAP berbasis Akrual. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada variabel tingkat pendidikan penyusun laporan keuangan ( $X_1$ ), variabel kualitas teknologi informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ( $X_2$ ), variabel Pelatihan pembuatan Laporan Keuangan berbasis akrual ( $X_3$ ) dan Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung ( $Y$ ). Pada prinsipnya, indikator variabel Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (Sarjono, 2012). Namun sebagai pengakuan akan keberhasilan penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual, maka indikatornya ditambah dengan opini WTP dari BPK.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini

1. Membuktikan secara empiris pengaruh variabel pendidikan, terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh variabel kualitas teknologi informasi terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh variabel pelatihan terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.2.1. Manfaat Bagi Akademisi**

Secara teori, manfaat yang bisa didapat oleh akademisi dari penelitian ini antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh pendidikan, kualitas teknologi informasi dan pelatihan terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan pengembangan penelitian yang sama di masa yang akan datang mengenai manajemen akuntansi keuangan.

#### **1.4.2.2. Manfaat Bagi Praktisi**

Secara teori, manfaat yang bisa didapat oleh para praktisi dari penelitian ini antara lain adalah hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan baru, baik dalam bidang manajemen akuntansi keuangan maupun bidang lainnya.

### **1.5.Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini, maka penelitian disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu:

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Landasan Teori**

Bab ini berisikan teori-teori pendukung penganalisaan dalam penelitian ini, yang meliputi: Standar Akuntansi Pemerintahan menuju akrual dan berbasis akrual serta teori tentang tingkat pendidikan, kualitas sistem informasi dan pelatihan. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan penelitian, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini, dan hal-hal yang akan dijelaskan adalah sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan tentang hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan.

**Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan rangkuman dari pembahasan dan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis dari hasil penelitian.